

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan issue yang paling hangat dalam sektor publik dewasa ini dan merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan itu, dan dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan *nepotisme*, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang hal yang sama dan sebagai tindak lanjut ketetapan MPR tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah memberikan pedoman pemerintahan yang baik (LAN, 2000:2).

Selama ini baik pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintah, walaupun secara prosedural telah

ditentukan antara lain adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, akan tetapi pada kenyataannya pencapaian sasaran kurang terorganisasi, terintegrasi dan tidak ada sinkronisasi satu sama lain.

Kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Karena itu diperlukan suatu pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja organisasi, hal ini juga sekaligus mengubah paradigma lama bahwa instansi yang sukses dinilai atas keberhasilannya dalam menyerap anggaran dan bukan atas pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam upaya mencapai tujuan, melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian yang obyektif dalam pengambilan keputusan manajemen (LAN, 2000:13).

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu

sistem pengukuran kerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintah, walaupun secara prosedural telah ditentukan antara lain adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Akan tetapi pada kenyataannya pencapaian sasaran kurang terorganisasi dan tidak ada sinkronisasi satu sama lain.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya berupaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, salah satu prioritasnya adalah pembangunan di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian juga puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Batudaa yang secara hukum berada di bawah naungan wilayah Kabupaten Gorontalo.

Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Kesehatan adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tertentu. Adanya otonomi daerah, di mana bidang kesehatan termasuk ke dalam urusan yang diserahkan kepada daerah dan adanya kebijaksanaan

swadaya serta masuknya sektor swasta dalam bidang kesehatan akan mendorong kompetisi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien, sehingga pemberi pelayanan kesehatan harus merubah pandangannya untuk lebih berorientasi pada pasar atau konsumen, dengan melakukan perbaikan mutu pelayanan.

Suatu yang perlu dilakukan terkait dengan usaha mengoptimalkan hasil kerja dari pegawai yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pekerjaan pegawai. Kinerja pegawai pada dasarnya merupakan ekspresi potensi diri, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas atau tugas utama yang difokuskan kepada hasil akhir sehingga menghasilkan sesuatu capaian dengan kualitas yang tinggi. Ekspresi potensi dari pegawai dalam bentuk kinerja tersebut merupakan akumulasi dari optimalnya kemampuan dalam rangka mencapai hasil kerja maksimal yang bermuara pada peningkatan kualitas pekerjaan yang di bebaskan padanya.

Berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada puskesmas di wilayah Kecamatan Batudaa, masih perlu ditingkatkan. Realitas yang teramati menunjukkan bahwa tingkat pelayanan dan produktivitas pegawai terhadap keperluan masyarakat belum maksimal. Kondisi yang terlihat bahwa beberapa pegawai masih sering membiarkan masyarakat menunggu lama terhadap keperluannya.

Implikasi lebih jauh dari kurangnya tingkat pelayanan pegawai dalam melayani masyarakat menyebabkan puskesmas ini belum optimal dalam mengembagkan fungsinya sebagai pusat pelayanan kesehatan. Berbagai

realitas yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada puskesmas diwilayah Kecamatan Batudaa belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian pengukuran potensi kinerja pegawai Puskesmas Kecamatan Batudaa dalam memberikan pelayanan kesehatan menarik untuk dilakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana kinerja pegawai Puskesmas Kecamatan Batudaa dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai Puskesmas Kecamatan Batudaa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, berupa bagaimana kinerja puskesmas Batudaa, faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja dan upaya yang dilakukan pihak puskesmas dalam meningkatkan kinerja pegawai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian tentang Potensi Kinerja Pegawai Puskesmas Wilayah Kecamatan Batudaa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yakni dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, otonomi daerah, pelayanan publik, dan keorganisasian.
2. Manfaat praktis yakni sebagai berikut:
 - a) Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman dan kontribusi dalam mengawasi kinerja pegawai puskesmas di wilayah Kecamatan Batudaa.
 - b) Bagi pegawai puskesmas di wilayah Kecamatan Batudaa dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.
 - c) Bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo agar dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kinerja pegawai puskesmas di wilayah Kecamatan Batudaa.